SIRD: #107
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION

Social Investment Indonesia

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE (HRDD) RANTAI PASOK

Memastikan Penghormatan HAM, Akuntabilitas Bisnis, dan Keberlanjutan Sepanjang Rantai Pasok.



Unang Mulkhan, MBA., PhD.
Pakar & Praktisi HRDD
in Supply Chain



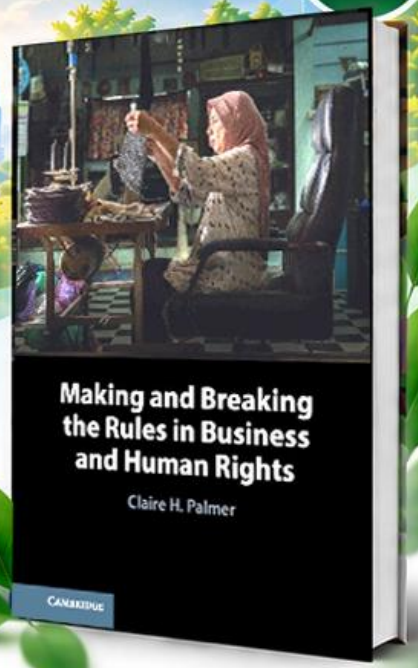
Ummu Azizah Mukarnawati
Co-Founder & Program Director
PT Gagas Inspirasi Nusantara



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia



Host
Nur Astri M. S.
Associate
Social Investment Indonesia



socialinvestment.id

Jumat,
30 Oktober 2026

15.00 – 17.00
WIB

Online via:
zoom



Gagas
Inspirasi
Nusantara

Human Rights Due Diligence Supply Chain

Konsep dan Refleksi Pengalaman Empiris

Disampaikan dalam Social Investment Roundtable Discussion (SIRD) 107
Social Investment Indonesia

Jumat, 30 Oktober 2026, oleh:

Ummu Azizah Mukarnawati
Co-Founder & Program Director PT Gagas Inspirasi Nusantara

Gagas Inspirasi Nusantara

In a NUTSHELL

Collaborative sustainability—engineered for impact

Gagas Inspirasi Nusantara is a sustainability fraction management firm that helps organizations transform its environmental and social ambitions into actionable strategies. We help you analyze economic, social, and environmental risks to develop tailored solutions that create measurable impact while strengthening your bottom line. Through comprehensive risk management and opportunity identification, ensures every sustainability initiative delivers measurable positive change while maintaining competitive advantage and positive change. Responsible business is better business

WE ENABLE YOU TO MANAGE

BUSINESS CONTINUITY RISK

Mitigating sustainability-related operational and business risks (materiality)

BUILDING REPUTATION

Fostering trust with stakeholders through clear governance communication

REPORTING ESG / SUSTAINABILITY REPORT

Helping you easily compile & measure Sustainability Reports—including SROI, CSR, ESG, and SR—that meet reporting standards for internal and external stakeholders

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AMBITION

Achieving your organization's sustainable development ambitions

Sustainability is a systemic issue complex and interconnected for any single entity to tackle alone—collaboration is essential. Cross-sector partnerships combine expertise, resources, and influence to address systemic issues.

No single discipline, sector, or expertise holds the full solution; but together, they can build a resilient future.

OUR EXPERTISE

with the sustainability CSR principles

CONSULTING & ADVISORY
IMPACT MEASUREMENT
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
EDUCATION & TRAINING
COMMUNICATION

PLAN	Social Mapping, Issue & Stakeholder Analysis, Stakeholder Dialog & Management, Risk Analysis (i.e materiality), Program Management Planning and consulting
DO	Program Design, Program Implementation / Deployment (PMO – fractional management), Mentoring and Monitoring, Baseline definition
CHECK	Monitoring, Evaluation, Impact Measurement, and CSR Audit
ACTION	After Action Review and Strategic Planning
COMMUNICATE	Develop communication IMPACT's asset of your public exposures (CSR Report, Sustainability Report, other communication medium)

PROFESSIONAL MEMBERSHIP

ISSP
INDONESIAN SOCIETY OF SUSTAINABILITY PROFESSIONALS
Association partner of International Society of Sustainability Professionals

IEPA
INDONESIAN ESG PROFESSIONAL ASSOCIATION

KADIN INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

SOCIAL VALUE
INDONESIA



Ummu Azizah Mukarnawati

Ummu Azizah Mukarnawati

ummu.azizah@gagasin.co
anna.ummu311@gmail.com

@annaummu311

+62 811948624

https://bit.ly/UAMukarnawati

UMMU AZIZAH MUKARNAWATI

Co-Founder & Programme Director PT Gagas Inspirasi Nusantara, A Business & Sustainability Consulting & Services

Educational Background :

- Bachelor Degree in Communication, Universitas Gadjah Mada
- Master Degree of Science in Communication & Media Studies, Airlangga University
- Management and Leadership, Duke Edu, Switzerland

Competency & Experience:

- Head of Organization Division of Indonesian ESG Professionals Society (IEPA)
- Member of Indonesia Society of Sustainability Professionals (IS2P)
- Member of International Society of Sustainability Professionals (ISSP)
- Certified Associate Member of Social Value Indonesia (SVID)
- Expert Team Member of Corporate Forum for CSR Development (CFCD)
- Deputy Chairperson of the Standing Commission for Social Affairs and Disaster Management KADIN
- Human Rights Consultant of Ministry of Human Rights of The Republic of Indonesia
- Member of Indonesia CSR Society
- Gender Specialist USAID Kolektif
- Former CSR Senior Manager PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
- Former CSR Senior Manager PT Holcim Indonesia Tbk
- Business & Human Rights enthusiast
- Gender, Diversity & Inclusion adviser
- Practitioner Lecturer at BINUS University, Universitas Gadjah Mada, Universitas Multi Media Nusantara
- Head of Jury of Indonesia Sustainability Awards 2026, Head of Jury Indonesia Inventors Day Awards 2025 INNOPA, Chief of Indonesia Jury of Asian ESG Positive Impact Awards 2025, Lestari Awards 2025 Kompas Gramedia Group,Jury Panel for IKMI Awards Kilang Pertamina International, TOP CSR, ISDA, ICA, West Java CSR Forum Awrad, Bina UKM Yayasan CFCD Award, Jury Panel of CSR Excellence Awards.

DISCLAIMER

Presentasi ini berisi hasil pemikiran pribadi yang diramu berdasarkan berbagai pengalaman, dan referensi yang merupakan hak kekayaan intelektual, serta ditujukan hanya untuk menyampaikan gagasan sebagai pemantik diskusi pada SIRD Ke 107 SII, tanggal 30 Oktober 2026. Presentasi ini juga tidak dimaksudkan untuk menghasut, menyudutkan, menentang, mengeksploitasi dan menyalahkan pihak-pihak yang tertulis di dalamnya.

Tindakan menyalin, memperbanyak, mendistribusikan, menggunakan, atau mengimplementasikan sebagian atau seluruh konten diperkenankan dengan persetujuan tertulis sebelumnya.

Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

KEBERLANJUTAN: DARI KEADILAN ALAM HINGGA TANGGUNG JAWAB KORPORASI



1. KEBERLANJUTAN ADALAH KEADILAN & INKLUSIVITAS SUMBER DAYA.

Bukan sekadar pelestarian pohon atau emisi. Memastikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi semua, kini dan nanti.



Eksploitasi Berlebihan



Pelanggaran HAM

2. ISU HAM alam secara berlebih = Hilangnya hak hidup, kesehatan, air bersih, dan masa depan bagi kelompok rentan.



3. PENGELOLAAN WAJIB MEMENUHI KEADILAN & HAM.

Operasional dan seluruh rantai pasok harus berjalan di atas prinsip Katas prinsip Keadilan Lingkungan & Penghormatan HAM.



- Identifikasi
- Cegah
- Mitigasi
- Pertanggungjawaban

HRDD: Uji Tuntas HAM

4. SOLUSI:
TERAPKAN HRDD DI SEPANJANG RANTAI PASOK.

Langkah konkret, terukur, dan legal untuk memitigasi risiko dan menjamin kepatuhan bisnis yang beretika.

diilustrasikan oleh Ummu A. Mukarnawati

Sustainability

Prinsip dan filosofi *sustainability* (keberlanjutan) adalah memenuhi kebutuhan hidup generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan dan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

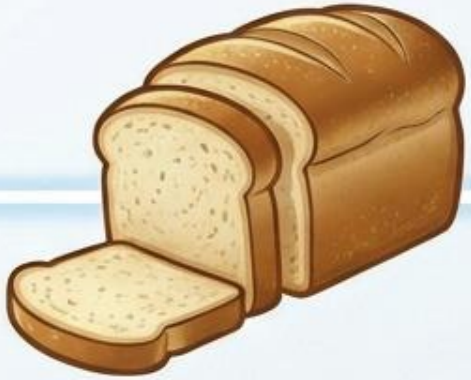
A



P



M



K



Justice | **Human Rights** | **Inclusion**

ISO 26000 | UNGPs | OECD | IFC PS | ICMM | SA8000 | RSPO | IRMA | GRI | IFRS | ESRS | S&P Global CSA | Sustainalytics | EcoVadis | UNGC | Perpres No. 60 Tahun 2023 Stranas BHAM | POJK 51/207 | SDGs | Permen PPPA No. 1 Tahun 2020 | Permen ATR/BPN No.14/2018

Diadopsi dari *Gender Mainstreaming* oleh Ummu A. Mukarnawati

Universal Declaration of Human Rights

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak atas **tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan** dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

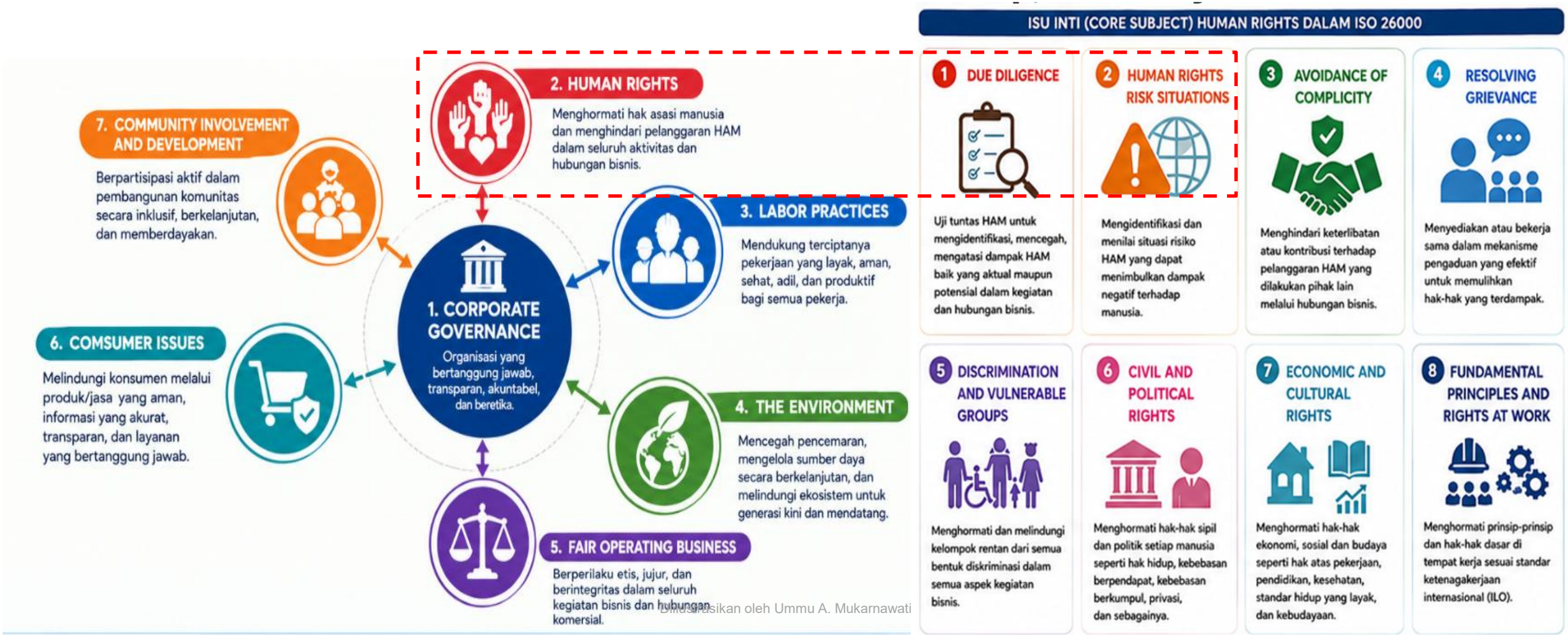


Source : Infografis oleh Zheva F. Irhamsyah

Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

Human Rights dalam CSR Framework

ISO 26000 Guidance on Social Responsibility



Organisasi/perusahaan harus menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berarti mereka harus menghindari pelanggaran terhadap HAM pihak lain serta menangani dampak buruk terhadap HAM yang melibatkan mereka selama operasionalnya.

Bertanggung jawab atas dampak secara etis

ISO 26000

6.3.4 Isu hak asasi manusia 2: Situasi berisiko hak asasi manusia

6.3.4.1 Deskripsi Isu

Ada situasi dan lingkungan tertentu yang kemungkinan besar lebih menantang dan dilematis bagi organisasi dalam hal hak asasi manusia dan yang kemungkinan risiko pelanggaran hak asasi manusianya bisa lebih buruk. Situasi ini antara lain:

- konflik [129] atau ketidakstabilan politik yang ekstrim, kegagalan sistem demokrasi atau sistem peradilan, tidak adanya hak-hak sipil atau politik;
- kemiskinan, kekeringan, masalah kesehatan ekstrim atau bencana alam;
- keterlibatan dalam kegiatan ekstraktif atau kegiatan lain yang mungkin berdampak signifikan pada sumber daya alam seperti air, hutan atau atmosfir atau yang dapat mengganggu komunitas;
- kedekatan jarak operasi organisasi dengan komunitas masyarakat asli [75][154];
- kegiatan yang berdampak pada atau melibatkan anak-anak [81][82][116][117][135] [147] 148];
- budaya korupsi;
- rantai nilai yang kompleks yang melibatkan pekerjaan informal tanpa perlindungan hukum; dan
- adanya kebutuhan untuk melakukan langkah besar untuk menjamin keamanan bangunan atau aset lain.

Sumber: ISO 26000 Guidance on Social Responsibility: 2010



Business and Human Rights

3 PILAR UNGPs



1. Kewajiban Negara Melindungi HAM

Negara memastikan bahwa Bisnis Tidak Melanggar HAM

2. Tanggung Jawab Perusahaan Menghormati HAM

Perusahaan Harus Menahan Diri untuk Tidak Melanggar HAM dalam Operasi Bisnisnya

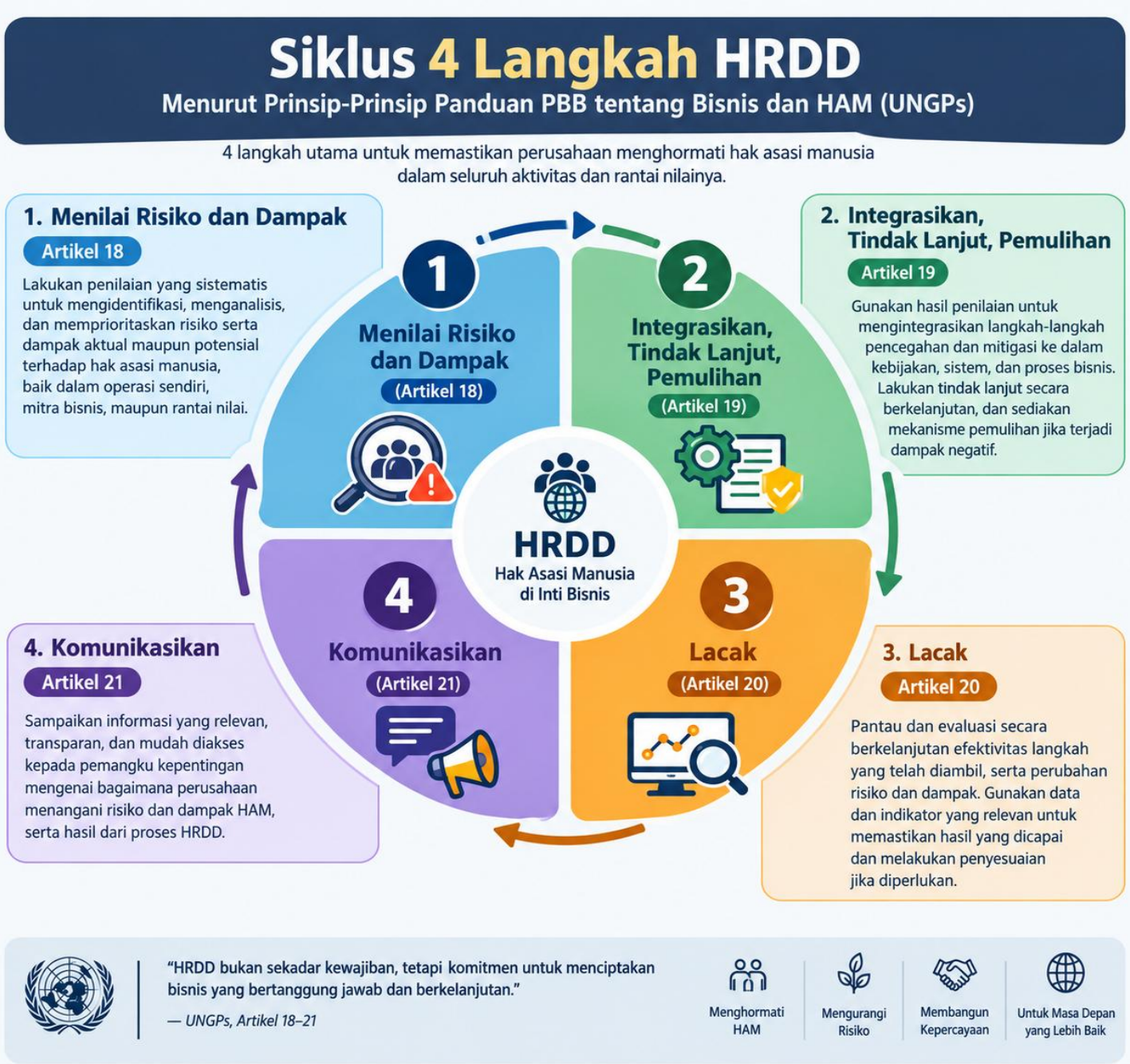
3. Akses Pada Pemulihan

Jika Perusahaan Melanggar HAM, Pemerintah Memastikan adanya Proses Pemulihan

Source: Pengantar BISNIS dan HAM , Zainal Abidin, SH, MLaw & Dev



Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624



Contoh Step 1
- Identifikasi pemegang hak dan kelompok rentan
- Self assessment (PRISMA)
- Melakukan HRIA/HRRA

Contoh Step 2.
- Meminta maaf, rehabilitasi lingkungan
- Community Development, fasilitas khusus karyawan
- Perempuan dan disabilitas,
- Penanangan mekanisme keluhan (WBS, Grievance Mechanism)
- Perbaikan proses produksi

Contoh Step 3.
- Monitoring proses perbaikan
- Evaluasi KPI
- Melakukan impact measurement (SLI, SROI)
- Forum Konsultasi masyarakat

Contoh Step 4
- Human Rights Report
- Annual Report
- Sustainability Report

Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

Supply Chain/ Rantai Pasok

SIKLUS SUPPLY CHAIN (RANTAI PASOK)

Kolaborasi untuk nilai berkelanjutan



1 Pemasok Bahan Baku

Menyediakan bahan mentah dan komponen dasar yang dibutuhkan untuk proses produksi.

Contoh Stakeholder:
- Petani/peternak/perkebunan
- Pemasok bahan baku & komponen
- Perusahaan tambang
- Komunitas/publik/masyarakat



2 Produsen/Manufaktur

Mengolah bahan baku menjadi produk jadi melalui proses produksi dan perakitan.

Contoh Stakeholder:
- Pabrik/perusahaan manufaktur
- Pekerja/buruh
- Serikat pekerja
- Komunitas/publik/masyarakat



3 Pemasok Layanan & Logistik

Mengatur transportasi, penyimpanan, (pergudangan), dan pengiriman barang dengan aman.

Contoh Stakeholder:
- Perusahaan logistik/ekspedisi
- Penyedia pergudangan
- Perusahaan pelayaran/air freight
- Komunitas/publik/masyarakat



4 Distributor/Retailer

Menyalurkan dan memasarkan produk jadi dari produsen ke pasar agar mudah diakses.

Contoh Stakeholder:
- Distributor
- Retailer/toko/modern trade
- E-commerce platform
- Komunitas/publik/masyarakat



5 Konsumen

Pengguna akhir yang membeli, menggunakan, atau mengonsumsi produk yang dihasilkan.

Contoh Stakeholder:
- Konsumen individu/rumah tangga
- Pelanggan korporasi/B2B
- Komunitas/publik/masyarakat

Rantai pasok yang kuat, mendukung nilai yang berkelanjutan.

Sumber Referensi:

1. ISO 26000:2010. *Guidance on Social Responsibility*. International Organization for Standardization (ISO).
2. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). 2011.
3. World Economic Forum. (2019). *Supply Chain 4.0: Global Practices and Lessons Learned.*
4. UN Global Compact & BSR. (2015). *Supply Chain Sustainability: A Practical Guide for Continuous Improvement, Second Edition.*

Diilustrasikan oleh Ummu A. Mukarnawati, 2026

Skema Supply Chain dan HRDD Supply Chain

Kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk rantai pasok yang bertanggung jawab, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia.

Rantai pasok yang berkelanjutan dimulai dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1 Skema Supply Chain & Stakeholder di Setiap Tahap



Pemasok Bahan Baku
(Upstream)

Stakeholder utama
- Petani, pekebun, nelayan, penambang
- Pemasok bahan baku/komoditas
- Koperasi dan asosiasi produsen
- Pemerintah (regulator, dinas terkait)
- Masyarakat lokal dan komunitas adat
- LSM lingkungan & HAM



Produsen / Manufaktur
(Tier 1)

Stakeholder utama
- Manajemen & karyawan pabrik
- Pemasok (Tier 2, Tier 3, dst)
- Penyedia jasa pendukung (maintenance, keamanan, dll)
- Serikat pekerja
- Pemerintah (perizinan, ketenagakerjaan)
- LSM & komunitas sekitar



Pemasok Layanan & Logistik
(Tier 2, 3, dst)

Stakeholder utama
- Perusahaan logistik & transportasi
- Penyedia jasa pergudangan
- Pemasok komponen/kemasan
- Penyedia layanan (asuransi, IT, dll)
- Pemerintah (perizinan, keselamatan)
- Masyarakat sekitar & komunitas (wilayah operasional)



Distributor / Retailer
(Downstream)

Stakeholder utama
- Distributor & wholesaler
- Retailer / toko / e-commerce
- Perusahaan transportasi
- Pemasaran & perdagangan
- Pemerintah (perizinan, pajak, BPOM)
- Konsumen
- Media



Konsumen
(End User)

Stakeholder utama
- Individu / rumah tangga
- Komunitas / masyarakat
- Organisasi masyarakat sipil
- Lembaga perlindungan konsumen
- Pemerintah (perlindungan konsumen)
- Media

Supply Chain melibatkan kolaborasi dan tanggung jawab bersama dari hulu ke hilir,
untuk memastikan produk atau jasa yang dihasilkan aman, berkualitas, berkelanjutan, dan menghormati hak asasi manusia.

2 HRDD Supply Chain

Human Rights Due Diligence (HRDD) di rantai pasok adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang mungkin terjadi di seluruh rantai pasok.

1 Menilai Risiko dan Dampak (Artikel 18, 19, 20, 21)
Mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan risiko serta dampak terhadap hak asasi manusia di seluruh rantai pasok.

2 Integrasikan, Tindak Lanjut, Pemulihan (Artikel 18, 19, 20, 21)
Mengintegrasikan hasil penilaian ke dalam kebijakan, sistem, dan proses; mengambil tindakan mitigasi; serta memulihkan jika terjadi dampak negatif.

3 Lacak (Artikel 18, 19, 20, 21)
Memantau dan mengevaluasi efektivitas tindakan serta perubahan risiko dan dampak.

4 Komunikasikan (Artikel 18, 19, 20, 21)
Menyampaikan informasi secara transparan kepada pemangku kepentingan, termasuk pekerja, komunitas, dan konsumen.

Stakeholder Lintas Rantai Pasok
(terlibat di seluruh siklus HRDD)

- Perusahaan pembeli (lead company)
- Pekerja & serikat pekerja
- Pemasok & mitra bisnis
- Masyarakat terdampak & masyarakat adat
- Pemerintah & regulator
- Investor & pemegang saham
- LSM & organisasi masyarakat sipil
- Ahli independen & auditor

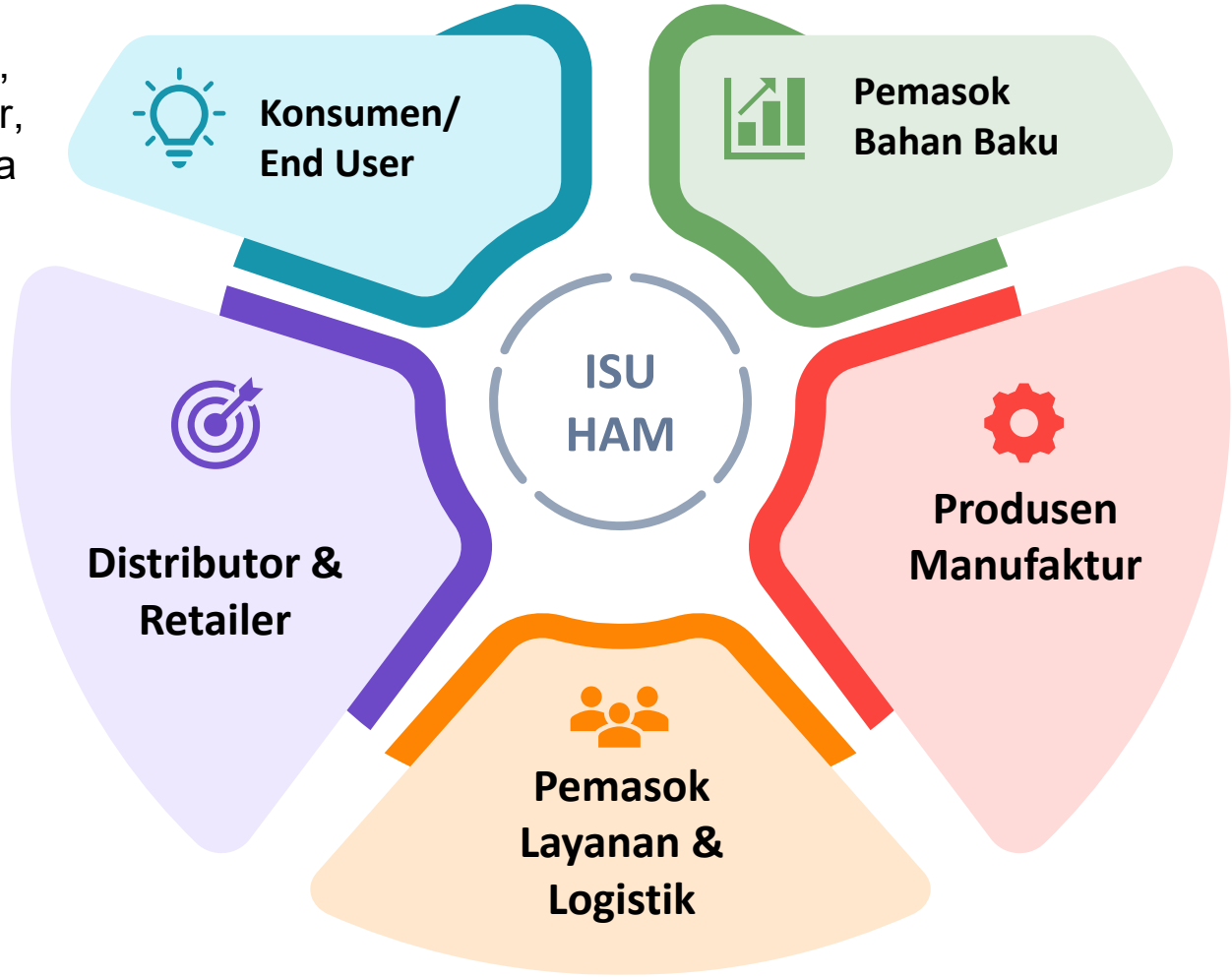
Dampak Strategis bagi Perusahaan
- Mitigasi risiko (operasional, reputasi, hukum)
- Keberlanjutan bisnis (jangka panjang)
- Kepercayaan pemangku kepentingan (investor, konsumen, masyarakat)
- Nilai tambah & daya saing

Prinsip Utama UNGPs
Kolaborasi • Transparansi • Akuntabilitas
Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

,Diilustrasikan oleh Ummu A. Mukarnawati

Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

Isu HAM di Sepanjang Supply Chain



Keselamatan dan kesehatan, GEDSI, informasi yang benar, privasi, akses yang adil, serta dampak limbah terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kerja paksa, pekerja anak, upah layak, keselamatan kerja, GEDSI, KBG, diskriminasi, eksploitasi, hak atas tanah, dan dampak lingkungan terhadap masyarakat.

Kondisi kerja, diskriminasi, GEDSI, privasi data, KBG, keamanan produk, transparansi informasi, dan aksesibilitas.

Jam kerja berlebihan, GEDSI, diskriminasi, eksploitasi, kebebasan berserikat, upah, kondisi kerja aman, KBG, dan mekanisme pengaduan.

Keselamatan kerja, jam kerja pengemudi, GEDSI, upah, status kerja, eksploitasi pekerja kontrak, KBG, dan perlakuan diskriminatif.

Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

Menilai Risiko & Dampak (HRIA, HRRA)

4 Pilar Utama Hak Asasi Manusia (HR)

Panduan bagi Perusahaan dalam Menghormati, Melindungi dan Memenuhi HAM

Disarikan oleh Ummu A. Mukaranwati dari UNGPs Artikel 18

1 Tujuan Utama (HRIA/HRRA)



- **Mengukur Risiko Nyata & Potensial:** Aktivitas perusahaan & hubungan bisnis.
- **Kontekstual & Spesifik:** Memahami dampak pada orang spesifik dalam konteks operasional.

2 Prinsip & Ketentuan Pelaksanaan



- **Keahlian HAM:** Memanfaatkan pakar internal & eksternal independen.
- **Konsultasi Bermakna:** Melibatkan kelompok potensial terdampak & pemangku kepentingan relevan.
- **Opsi Alternatif Konsultasi:** Sumber ahli independen terpercaya.

3 Fokus Perlindungan Khusus & Acuan



- **Kelompok Rentan & Perspektif Gender:** Perhatian khusus risiko terpinggirkan & perbedaan risiko gender.
- **Acuan HAM Internasional:** Seluruh hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

4 Frekuensi & Momen Pelaksanaan



- **Bersifat Dinamis:** Secara periodik selama siklus hidup.
- **Momen Kunci (Sebelum):** Aktivitas baru, perubahan operasional mayor.
- **Respons (Antisipasi):** Perubahan lingkungan operasional.

Integrasi, Tindak Lanjut, Remedy/Pemulihan

https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2026?responseId=R_2S1EDETvhCr2pyc

Response and Reporting

HR/L5. Within the reporting period, has the company been involved in providing or enabling remedy where it has caused or contributed to adverse impact(s) associated with the following human rights & labour rights topic(s)?

(Select one answer per line)

	No adverse impact identified or caused	Yes, adverse impact(s) identified, but no remedy provided/enabled	Yes, adverse impact(s) identified, and remedy provided/enabled	Choose not to disclose
Freedom of association and the right to collective bargaining	✓	○	○	○
Child labour	✓	○	○	○
Forced labour	✓	○	○	○
Non-discrimination and equality (in respect of employment and occupation)	○	○	✓	○
Safe and healthy working environment (incl. sexual harassment, violence and abuse at work)	○	○	✓	○
Wages	✓	○	○	○
Gender equality and women's rights	✓	○	○	○

Copilot

https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2026?responseId=R_2S1EDETvhCr2pyc

in the reporting year by the total number of hours worked by all employees during the same period. The result should then be multiplied by 200,000. Please refer to the CoP guidebook for additional information on the work-related accidents rate formula.

		Unknown	Choose to not disclose
Rate of work-related accidents (Please input a number rounded to two decimal places, e.g., 1.55)	0.9	○	○

HR/L7A. (Optional) Please provide additional information:

In 2025, Holcim had a rate of recordable incidents employees of 4.5(# of injuries and occupational illness per million work hours) or 0.90 recordable incidents per 200,000 work hours.

HR/L8. (Optional) Briefly describe additional relevant, practical actions the company has taken within the reporting period and/or plans to take to implement the human rights and labour principles, including goals set and any challenges faced and actions taken towards prevention and/or remediation.

workers' rights. This applies to direct employees as well as contractors. We respect and support children's rights in our operations and supply chain. Holcim is at the beginning of the supply chain, therefore our Human Rights Impact Assessment and actions with communities are key levers to identify and act to eliminate child labor and forced labor, for example by implementing social initiatives addressing communities' socioeconomic challenges. All our countries now have human rights assessments and action plans in place. Holcim is committed to a Just Transition. A Just Transition means moving toward a low-carbon economy in a way that protects people, creates decent work, builds new skills, and ensures no one is left behind. For Holcim, this transition is fair, inclusive, and people-centered. Our Just Transition plan shows how we are supporting our people, suppliers, customers, and communities. Refer to our Just Transition

Prevention – Remedy ⟺ Reputational, Financial, Legal

https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2026?responseId=R_2S1EDETvhCr2pyc

Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

Lacak



HR/L7A. (Optional) Please provide additional information:

In 2025, Holcim had a rate of recordable incidents employees of 4.5(# of injuries and occupational illness per million work hours) or 0.90 recordable incidents per 200,000 work hours.

HR/L8. (Optional) Briefly describe additional relevant, practical actions the company has taken within the reporting period and/or plans to take to implement the human rights and labour principles, including goals set and any challenges faced and actions taken towards prevention and/or remediation.ⓘ

new health, safety and environmental standards. We made significant progress on our targets related to Occupational Safety and Health. Health, Safety and Environment (HSE) are core values at Holcim. These values are top of mind across all operations as we work to achieve Ambition "0". In 2025, we had zero fatalities (activities under our direct control) and our lost-time injury frequency rate (LTIFR) fell to 0.36, with 99% of our sites and 60% of countries reporting zero lost-time injuries (LTIs). Our operating model is delivering results, confirming that we are on the right path toward achieving zero harm.

https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2026?responseId=R_2S1EDETvhCr2pyc

SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE

	Unit	2023 restated	2024 restated	2025
ESG risk identification				
Spend with "assessed" potential high ESG impact suppliers	%	89	80	**89**
Spend covered by GRUs with due diligence process in place	%	99	99	**99**
Suppliers from national markets	%	88	90	**89**
Suppliers identified as having potential high ESG impact	%	33	39	**36**
Spend covered by suppliers with potential high ESG impact	%	52	64	**66**
Suppliers non-compliant with Supplier Code of Conduct	%	1	22	**24**
ESG risk management				
Non-compliant suppliers with corrective action plans	%	87	83	**92**
Non-compliant suppliers that have improved sustainability performance	%	43	68	**80**
Non-compliant suppliers canceled due to non-compliance	%	2	16	**3**

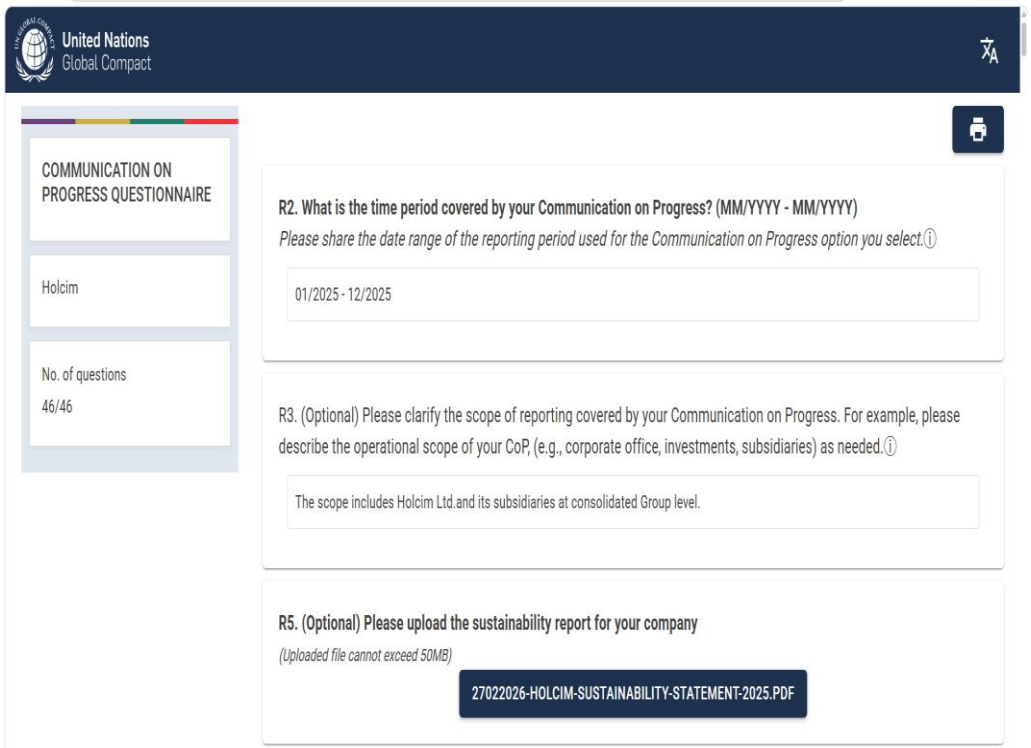
https://www.holcim.com/sites/holcim/files/docs/27022026-holcim-sustainability-statement-2025.pdf

- Internal tracking tools: KPI achievement, audit, survey
- HRDD Report
- CSR/ESG/Sustainability Report
- Feedback loop

Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

Komunikasi





https://cop-report.unglobalcompact.org/COPViewer/2026?responseId=R_2S1EDETvhCr2pyc

HR/L4.1A. (Optional) Please provide additional information:

As of today, all of our countries have a human rights assessment process in place and have defined action plans to address risks based on our methodology. As part of our work to identify risks and potential issues at site level, 100% of sites in all high/medium risk countries have conducted human rights assessments in the last three years. Every cement and grinding site must have a locally managed stakeholder map and engagement plan in place. Through our sustainable procurement program, 89% of the procurement spend with high ESG risk suppliers is done with qualified suppliers. We have implemented programs and initiatives to promote gender equality and women's rights. We aim to increase the number of women in senior management positions to 30% and reduce our

Praktik yang Terjadi



Desain asesmen, penetapan tim, **waktu**, pemetaan awal rantai pasok, tinjauan data sekunder, pemetaan risiko awal, identifikasi kelompok terdampak, penyusunan protokol keselamatan serta kerahasiaan

1 SEBELUM ASESMEN



Wawancara pekerja secara privat, konsultasi masyarakat, observasi, pemeriksaan dokumen, diskusi dengan perwakilan yang sah, dan sumber independen.

2 PENGUMPULAN BUKTI



Triangulasi bukti, penilaian tingkat keparahan, identifikasi kelompok paling terdampak, analisis penyebab, dan penentuan keterlibatan perusahaan: menyebabkan, berkontribusi, atau terkait langsung melalui hubungan bisnis.

3 ANALISIS & VALIDASI



Tetapkan tindakan pencegahan, mitigasi, dan pemulihan sesuai kebutuhan; tentukan penanggung jawab, tenggat, indikator efektivitas, serta cara melaporkan kembali hasil kepada stakeholder

4 KEPUTUSAN & TINDAK LANJUT

Tantangan di lapangan

- Rantai pasok tidak transparan.
- Data risiko HAM terbatas.
- Sulit menentukan prioritas.
- Stakeholder yang tepat belum teridentifikasi
- Konflik kepentingan dalam desain

- Ketakutan terhadap pembalasan
- Bias informasi dari perusahaan.
- Keterwakilan stakeholder
- Hambatan bahasa, budaya, dan akses.
- Bukti sulit diverifikasi

- Bukti saling bertentangan.
- Kesulitan menilai keparahan
- Akar penyebab tidak terlihat
- Dampak tersembunyi dan berlapis
- Hubungan perusahaan dengan dampak tidak jelas.

- Komitmen manajemen tidak memadai
- Ketergantungan pada pemasok
- Solusi tidak menyentuh akar penyebab
- Pemulihan bagi korban terabaikan
- Efektivitas tindakan sulit diukur

Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

Praktik yang Terjadi

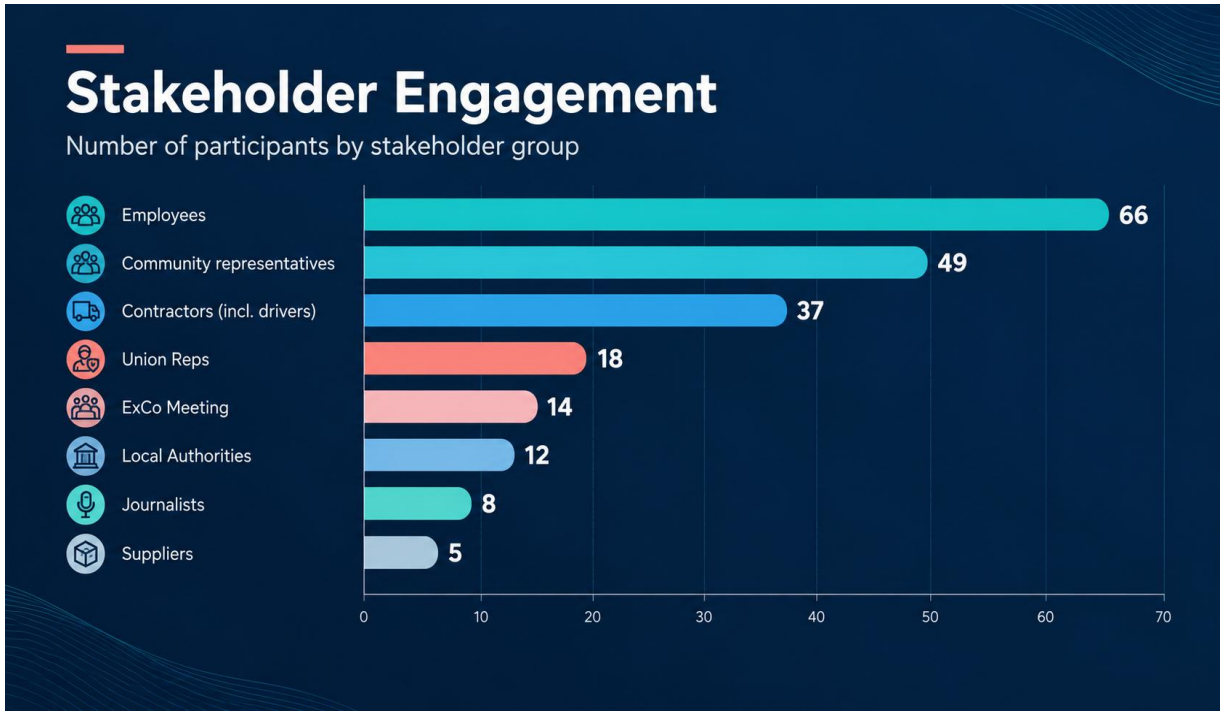
- Human Rights Phobia - Persepsi HAM sebagai "Momok" & Resistensi Internal Organisasi
- Bias "Human Rights Washing" dan Kebiasaan Meromantisasi Kinerja CSR
- Kesulitan Membedakan "Risiko Bisnis" vs "Risiko terhadap Pemegang Hak" (*Rights-holders*)
- Tantangan Inklusivitas dan Partisipasi Bermakna (*Meaningful Engagement*)
- Kompleksitas Pemetaan Rantai Pasok (*Supply Chain Visibility*) dan Pihak Ketiga
- Pemilihan stakeholder informan yang cenderung “aman”

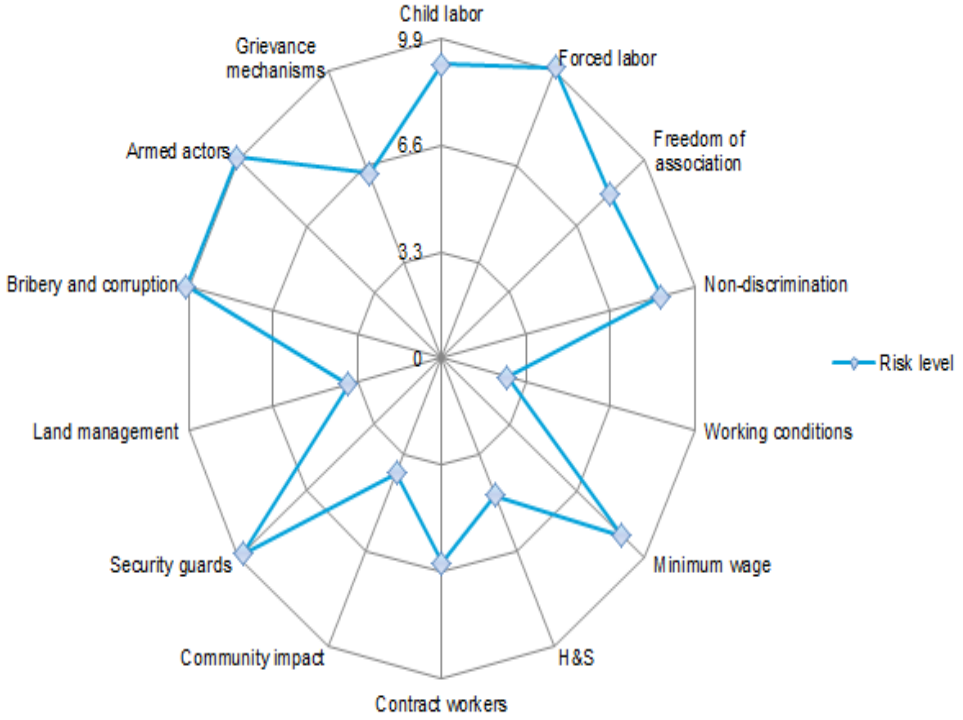
- Ketakutan Menampilkan Kesenjangan (*Fear of Exposure*) dan Krisis Reputasi
- Bahaya Komunikasi Formalitas (*Greenwashing / Social-Washing*)
- Keragaman Audiens dan Bahasa Komunikasi yang Tidak Inklusif
- Tantangan Kerahasiaan Data vs Transparansi Akuntabel
- Komunikasi Satu Arah tanpa *Feedback Loop*



Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

Praktik yang terjadi





Fakta yang tersembunyi dan tak terlaporkan:

- Child Labor pada jalur informal, *outsourcing*, atau hubungan keluarga di rantai pasok hilir/pemasok bahan baku (Tier 2 hingga Tier 4).
- Modern slavery/forced labor pada Tier 1 (perusahaan atama), Tier 2 hingga Tier 4
- Kondisi kerja tidak layak pada Tier 2 sampai Tier 4
- Upah dibawah UMK pada Tier 2 sampai Tier 4
- Kebebasan Berserikat pada Tier 2 sampai Tier 4
- Isu gender (Diskriminasi, Pelecehan/GBV pada Tier 1 sampai Tier 4
- Suara konsumen sebagai end user dalam rantai pasok (feedback, close loop)

PELUANG STRATEGIS:
INTEGRASI UJI TUNTAS & KOMUNIKASI HAM

Mentransformasi Risiko Menjadi Nilai Tambah Bisnis *(Value Creation)*

INSTRUMEN NASIONAL PRAKTIS



Poin Kunci:

- PRISMA Kemenkumham
- Panduan Self-assessment Digital Resmi
- Early Warning System Mitigasi Hukum
- Memfasilitasi Dialog Internal

AKSES PASAR GLOBAL



Poin Kunci:

- UNGPs & OECD Guidelines
- Kepatuhan EU CSDDD & EUDR
- Menjadi Preferred Vendor Rantai Pasok

INTEGRASI ESG & AKSES KAPITAL



Poin Kunci:

- Pelaporan GRI & ISSB
- Meningkatkan Skor S (Social) & G (Governance)
- Sustainable Finance (SIB, Impact Investing)

STANDAR KUNCI SEKTORAL



Poin Kunci:

- Sektor Spesifik: Tambang (IRMA, ICMM)
- Agribisnis (RSPO, ISPO)
- FMCG (ISO 26000, SMETA)

KEUNGGULAN REPUTASI



Poin Kunci:

- Social License to Operate (SLO)
- Meminimalkan Konflik Sosial
- Daya Tarik Talenta Profesional

Disarikan oleh Ummu A. Mukarnawati

Mengubah Pelaporan Menjadi Narasi Transformasi yang Jujur dan Terukur.

Ummu A. Mukarnawati | anna.ummu311@gmail.com | 0811948624

Sustainability is all about Human Rights

- Ummu Azizah Mukarnawati, Co-Founder & Program Director GAGASIN, 2025 -


“Dimulai dari langkah kecil
menuju pijakan dan
langkah besar.”
Terima Kasih